

Pengakuan Akuntansi Atas Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset Pada Sektor Hulu Migas

Rena Maya Cahyanti¹, Aruna Wirjolukito²

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia¹

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia²

Abstract. *This research will discuss the recognition of asset abandonment and site restoration or commonly known as ARO (Asset Retirement Obligation). The purpose is to provide an overview that can be used by companies in calculating ARO that must be paid at the end of the contract period. The formulation of the problem is which method is used to determining the amount of asset abandonment and site restoration or ARO that is appropriate to overcome the potential problems that arise at the end of the contract period. This research is carried out by using a mixed method in analyzing the findings, so it will find the in-depth findings which will be useful to assist the company's management in making decisions. Signal theory is a theory that will be chosen in this research. This research will use three stages of analysis, such as descriptive analysis, content analysis, and constant comparative analysis. Based on the results it might found that the recognition of asset abandonment and site restoration carried out according to regulations apply. While company uses the method of calculating liabilities based on future values that is continually calculate in present value.*

Keywords. *Contingent Liabilities, Provisions; Liability For Asset Abandonment; Site Restoration.*

Abstrak. Penelitian ini akan membahas pengakuan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau lebih dikenal sebagai ARO (Asset Retirement Obligation). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan gambaran mengenai metode yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung besar ARO pada akhir kontrak. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed-method*) dalam menganalisa hasil temuan, sehingga akan menghasilkan hasil temuan yang lebih mendalam yang berguna untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Teori sinyal adalah teori yang akan dipilih di dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan tiga tahap analisis yaitu deskriptif analisis, konten analisis, dan komparatif konstan analisis dalam mengaitkan temuan dengan kewajiban penghentian aset yang diatur dalam PSAK 57. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengakuan kewajiban atas ARO yang dilakukan perusahaan sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dimana perusahaan menggunakan metode perhitungan nilai kewajiban berdasarkan future value yang kemudian di present value kan.

Kata kunci. Kewajiban Kontinjensi; Kewajiban Pembongkaran; Provisi; Restorasi Aset.

Corresponding author. Email: Renamayaa@gmail.com, Aruna.wirjolukito@gmail.com.

How to cite this article. Cahyanti, R. M., & Wirjolukito, A. (2019). Pengakuan Akuntansi Atas Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset Pada Sektor Hulu Migas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 303–318.

History of article. Received: April 2019, Revision: Juni 2019, Published: Agustus 2019

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i2.17290

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

PENDAHULUAN

Bumi dianugerahi dengan sumber daya alam yang sangat beragam salah satu diantaranya adalah sumber daya yang berasal dari minyak dan gas bumi (migas) dan non-migas. Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang dianugerahi kedua macam sumber daya ini dengan melimpah. Pernyataan ini sesuai dengan data penerimaan negara bukan pajak yang dipublikasikan Kementerian

Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018 yang menunjukan bahwa pendapatan negara dari minyak dan gas bumi menunjukkan hasil yang masih sangat tinggi dan merupakan pendapatan penerimaan sumber daya alam tertinggi yang diperoleh Indonesia. Pendapatan pada sektor ini memanglah tinggi, dan sebanding dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Negara dari sektor ini. Sesuai dengan pendapat Yunus (Asisten Deputi

Penegakkan Hukum Pidana Kementerian Kehutanan) yang dikutip oleh Kusumawati (Kusumawati, 2015), di dalam industri pertambangan baik migas atau non-migas setiap perusahaan seharusnya sudah mendapatkan informasi mengenai risiko dari setiap pengeboran yang dilakukan. Sehingga segala dampak yang mungkin timbul sudah dapat diminimalisir oleh perusahaan.

Untuk mencegah risiko dalam yang timbul dari kegiatan pengeboran tersebut, maka dibentuklah kewajiban atas penanggulangan dampak bagi perusahaan yang beroperasi dengan menggunakan lahan konsesi yang kemudian dikenal sebagai kewajiban pembongkaran aset dan restorasi area atau lebih umum dikenal sebagai ARO (*Asset Retirement Obligation*). Kewajiban ini merupakan kewajiban dari perusahaan yang menggunakan lahan konsesi untuk dapat mencadangkan estimasi beban untuk mengembalikan kondisi lokasi yang telah selesai digunakan menjadi seperti semula.

Perusahaan migas merupakan salah satu perusahaan yang wajib untuk mengembalikan lokasi di masa yang akan datang pada saat akhir masa kontrak. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan di dalam PSAK 57, bahwasanya entitas memiliki kewajiban kini yang merupakan kewajiban hukum jika ada suatu kontrak (baik secara eksplisit maupun implisit) atau merupakan kewajiban konstruktif jika timbul berdasarkan peristiwa di masa lalu (IAI, 2018). Perusahaan tempat studi kasus penelitian ini memiliki kewajiban hukum karena memiliki kontrak (kewajiban kontraktual) terkait kewajiban pengembalian kondisi lokasi pada akhir periode kontrak.

Terkait hal tersebut adanya kewajiban yang timbul dapat diatribusikan ke dalam perolehan aset, sehingga kewajiban ini dapat dicatat sebagai aset atau dikapitalisasikan. Sedangkan nilai dari kewajiban yang akan timbul ini dianggap sebagai provisi karena merupakan sebuah estimasi (IAI, 2018). Meskipun pengaruh akan kewajiban ini tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, tetapi dikarenakan besarnya biaya kewajiban ini

yang akan dikeluarkan, maka nantinya akan timbul kewajiban yang juga cukup besar yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Penelitian mengenai ARO dipilih karena sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kewajiban atas ARO ini sifatnya masih berupa estimasi (IAI, 2018). Terlebih penelitian ini akan berlangsung pada suatu perusahaan yang memiliki kewajiban ARO berdasarkan suatu kontrak hukum yang secara eksplisit menyebutkan klausul atas kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk melakukan pengukuran ARO secara andal dibutuhkan banyak faktor yang mungkin saja berbeda walaupun pada industri yang sama. Sedangkan penyeragaman atas standar akuntansi dengan laporan keuangan perusahaan dibutuhkan kovergensi IFRS. Terkait dengan standar akuntansi yang mengatur mengenai ARO yaitu PSAK 57, standar akuntansi ini merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang telah mengadopsi IFRS secara menyeluruh.

Pengukuran secara andal atas besar nilai ARO dalam laporan keuangan perusahaan berguna untuk memberikan petunjuk bagi pihak eksternal perusahaan tentang bagaimana prospek perusahaan di masa depan. Dengan demikian jika perusahaan menyajikan nilai di laporan keuangan secara andal, maka perusahaan telah melindungi perusahaannya dari informasi yang asimetris yang berguna untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada di perusahaan mengenai metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menghitung besar kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO yang harus dibayarkan oleh perusahaan diakhir periode kontrak kerja sama perusahaan. Hal ini guna mengetahui apakah besaran estimasi tersebut dianggap mampu merepresentasikan nilai yang sesungguhnya harus diakui oleh perusahaan yang berguna nantinya untuk pengambilan keputusan perusahaan.

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait dengankewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO di mana setiap perusahaan yang menggunakan lahan konsesi negara khususnya perusahaan di sektor hulu migas berkewajiban untuk merestorasi lahan yang dimiliki pada akhir periode kontrak. Sehingga pertanyaan yang akan timbul dari permasalahan penelitian ini, adalah: Bagaimana cara/metode yang tepat untuk digunakan oleh perusahaan dalam menghitung besar ARO yang harus dibayarkan oleh perusahaan diakhir periode kontrak agar hal tersebut dianggap mampu merepresentasikan nilai yang sesungguhnya harus diakui oleh perusahaan?

Menurut Ellet suatu penelitian diharapkan memiliki manfaat untuk meningkatkan faktor positif yang ada guna pengambilan keputusan, mengetahui inti dari permasalahan yang ada, serta berguna dalam hal pengambilan keputusan strategis perusahaan (Ellet, 2009). Sedangkan untuk penelitian ini sendiri manfaat penelitian yang diharapkan yang dapat dijabarkan, antara lain: (1) Memberikan evaluasi positif bagi perusahaan dalam kaitannya dengan pengakuan atas besaran nilai kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO. Selain itu juga untuk mengoptimalkan solusi yang didapat dari temuan penelitian untuk kedepannya berguna bagi perusahaan agar dapat menggunakan metode yang tepat dalam mengakui besaran ARO. Selain itu juga untuk membantu para pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. (2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian yang akan datang untuk dapat menguji dan mencari tau metode yang tepat dan paling baik dalam mencari besaran kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO, sehingga segala ketidakpastian di masa depan dapat semakin diukur dengan cara yang andal.

KAJIAN LITERATUR

Tinjauan literatur yang dipilih dalam penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dan dapat menjelaskan mengenai kewajiban pembongkaran dan restorasi aset secara lebih

rinci dan mendalam berdasarkan pendapat para ahli. Tinjauan literatur juga akan berfokus menjelaskan mengenai kewajiban kontinjensi dan provisi yang tercakup dalam PSAK 57. Sedangkan teori yang dipilih adalah teori sinyal. Di mana teori ini dipilih karena dapat memberikan petunjuk bagi penanam modal (*investor*) tentang bagaimana manajemen memandang prospek masa depan perusahaan (Brigham & Houston, 2001). Berdasarkan teori ini maka dapat dianggap bahwa adanya keterkaitan antara pihak eksternal dan internal, yang menyebabkan suatu perusahaan diharuskan untuk dapat menyajikan laporan keuangan secara representatif guna mencerminkan keadaan perusahaan yang sebaik-baiknya.

Definisi ini dapat dianggap menjelaskan mengenai alasan mengapa perusahaan memiliki keharusan atau kewajiban untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak internal maupun pihak eksternalnya. Pengungkapan informasi kepada pihak eksternal ada kaitannya dengan alasan bahwa pihak internal perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan inti perusahaan dan proyek-proyek bisnis masa depannya dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan. Sehingga perusahaan harus melindungi perusahaannya dari informasi yang bersifat asimetri. Salah satu cara agar dapat mengurangi informasi yang bersifat asimetri ini adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar yaitu pihak eksternal perusahaan (Arifin, 2005). Sehingga dikarenakan secara garis besar teori sinyal erat kaitannya dengan adanya ketersediaan informasi, maka segala informasi yang dimaksud disini berarti adalah sebuah laporan kinerja perusahaan yang akan menampilkan gambaran keseluruhan kegiatan perusahaan pada suatu periode, yang mana laporan ini dikenal luas sebagai laporan keuangan suatu perusahaan (Kretarto, 2001).

Beberapa studi terdahulu yang digunakan peneliti sebagai data pembanding dalam penelitian ini di antaranya adalah sebuah artikel ringkasan yang berjudul *Accounting for Asset Retirement Obligations* yang dilakukan oleh Eric Alexander dan Ronald Hiner. Artikel ini berisi mengenai

penjelasan FASB issued statement no.143 mengenai *Asset Retirement Obligations* (ARO), di mana penulis menjelaskan poin-poin penting terkait *Asset Retirement Obligations* (ARO) dalam laporan keuangan perusahaan (Alexander & Hiner, 2001). Di mana dalam artikel tersebut hanya menjelaskan saja poin penting dari FASB no.143 tanpa memberikan adanya contoh yang relevan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kaitannya pencatatan akan hal tersebut.

Sedangkan kaitannya dengan kewajiban mengenai pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini dapat dilihat pada buku karangan Purba (Purba, 2009). Di buku ini dijelaskan bahwasanya standar akuntansi keuangan Indonesia saat ini yaitu menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang akan dikonvergensi dan dapat mengadopsi IFRS secara menyeluruh. Salah satu IFRS yang telah diadopsi secara menyeluruh oleh PSAK adalah PSAK No.57 yang turut mengatur mengenai *Asset Retirement Obligation* (ARO) di dalamnya.

Kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau yang lebih dikenal secara singkat dalam dunia akuntansi sebagai ARO dijelaskan secara implisit pada PSAK 16 mengenai aset tetap, PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi, serta di ISAK 19 mengenai penerapan pendekatan penyajian kembali. Suatu entitas memiliki kewajiban untuk mengakui kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO ketika entitas tersebut memiliki kewajiban secara hukum yang bersifat mengikat terkait aktiva jangka panjang yang nantinya entitas tersebut juga wajib melakukan estimasi atas kewajibannya tersebut (IAI, 2018).

Sedangkan menurut *Financial Accounting Standard Board* dalam FASB 143 yang efektif menggantikan *Financial*

Accounting Standard (FAS) 19 paragraf 37, ARO (*Asset Retirement Obligation*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum yang berkaitan dengan penarikan aset berwujud yang mempunyai umur panjang di mana waktu atau metode penyelesaiannya kemungkinan tergantung pada kejadian di masa depan, yang artinya kejadian tersebut mungkin saja tidak ada dalam kendali perusahaan (FASB, 2001). Suatu entitas wajib mengakui tanggung jawab atas *Asset Retirement Obligation* (ARO) pada periode berlangsung, misalnya pada saat akuisisi. Aset yang setara dengan kewajiban awal ditambahkan ke neraca, dan disusutkan dengan suatu metode penyusutan selama masa manfaat aset tersebut. Hasilnya adalah peningkatan aset dan kewajiban yang ada, sementara total biaya yang diharapkan diakui dari waktu ke waktu, secara akrual yang mana akan selalu meningkat secara majemuk (FASB, 2001)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai cara atau metode yang dilakukan perusahaan untuk mengakui adanya kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO. Dengan adanya kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO yang ditetapkan secara estimasi sehingga apakah hal tersebut mampu merepresentasikan keandalan laporan keuangan perusahaan sesungguhnya secara lebih mendalam agar dapat menjelaskan dan mengevaluasi, mengidentifikasi dan menganalisis, serta memberikan rekomendasi lebih rinci terhadap masalah tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode campuran atau *mixed-method* yaitu metode pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran ini dilakukan di dalam pengumpulan data, yaitu melalui wawancara mendalam (kualitatif) dan juga dengan menggunakan metode kuantitatif di mana akan ada penganalisaan lebih lanjut dari dokumen-dokumen pendukung yang nanti akan didapatkan selama proses penelitian. Metode

campuran dipilih karena akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih kaya, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting terkait dengan masalah penelitian. Dokumen-dokumen pendukung ini bisa berisi seperti laporan keuangan bulanan maupun tahunan serta laporan audit (*audit report*) perusahaan.

Instrumen-instrumen penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

Wawancara / Interview

Wawancara / interview merupakan teknik pengumpulan data yang pertama kali akan dilakukan dalam rangka pengumpulan data secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Tabel 2. Detail Narasumber Wawancara

No	Detail	Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3
1.	Waktu & Tempat	21 Maret 2019 dan 15 April 2019, wawancara dilakukan di kantor perusahaan	16 April 2019, wawancara dilakukan di kantor perusahaan	18 April 2019, wawancara dilakukan di kantor perusahaan
2.	Spesifikasi Jabatan Informan	Manager of Consolidation Reporting	Manager GAAP Reporting	Head of Planning & Domestic Assets
3.	Tahapan Wawancara	Narasumber pertama merupakan narasumber tahap pertama wawancara, yang akan mengkonfirmasi ulang dan menjadi dasar pengembang pertanyaan pada narasumber kedua.	Narasumber kedua melanjutkan pemberian informasi yang didapat dari narasumber pertama. Narasumber kedua lebih banyak memberikan detail dari tiap jenis klasifikasi aset dalam perhitungan ARO.	Narasumber ketiga memberikan pandangan dan pendapat mengenai klasifikasi jenis aset yang digunakan perusahaan dalam menghitung besaran ARO dari sisi dalam ekonom perusahaan.
4.	Gambaran Umum Hasil Wawancara Yang didapatkan	Dari narasumber pertama didapat data apa itu ARO, mengapa perusahaan wajib mengakui ARO, serta bagaimana pengakuan dan penerapannya di perusahaan.	Dari narasumber kedua didapat data ARO lebih mendalam bagaimana pihak akuntansi perusahaan mengakui ARO, bagaimana besaran angka tersebut didapat, diakui, dan disetujui serta klasifikasi aset mana yang masuk ke dalam perhitungan ARO.	Dari narasumber ketiga didapatkan data mengenai klasifikasi jenis aset yang dibuat perusahaan sudah tepat. Serta akan didapat bagaimana nanti penting keputusannya mengenai aset tersebut dapat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan dalam pandangan ekonom perusahaan.

Observasi akan dilakukan sebagai upaya menganalisa lebih lanjut segala dokumen dan data yang telah dikumpulkan terkait penelitian ini.

Dokumentasi bertujuan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang ada di dalam perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain adalah laporan keuangan atau laporan audit, kontrak-kontrak dengan pihak terkait, maupun data-data pendukung perhitungan laporan keuangan seperti kertas kerja yang dibuat.

Corporate Website

Website milik pihak yang diteliti dibutuhkan dalam rangka melengkapi data-data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini yang dapat digunakan sebagai pendukung untuk melihat secara lebih rinci atas data tempat penelitian berlangsung.

Analisis-*analisis* data penelitian yang dipilih dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

Analisis Deskriptif Kualitatif / *Descriptive Qualitative Analysis*

Analisis deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang digunakan sebagai prosedur penelitian guna menghasilkan data-data deskriptif berupa data-data tertulis ataupun lisan dari orang sekitar (Moleong, 2006). Pendekatan ini dilakukan karena di dalam penelitian ini awalnya bermula pada peristiwa atau kejadian yang terjadi secara ilmiah tanpa ada paksaan maupun rekayasa pada perusahaan tempat penelitian.

Analisis Konten / *Content Analysis*

Menurut Shelley & Krippendorff di dalam bukunya, menyebutkan bahwa:

“Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the context of their use”(Shelley & Krippendorff, 2006).

Sehingga dalam kaitannya dengan penelitian ini, analisis konten mempunyai cara tersendiri untuk menganalisis informasi di mana caranya berasal langsung dari objek analisa penelitian yaitu laporan keuangan perusahaan yang kemudian akan dipahami.

Analisis Komparatif Konstan / *Constant Comparative Analysis*

Analisa komparatif konstan dilakukan dengan membandingkan peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelum peneliti melakukan analisa, serta secara terus menerus sepanjang penelitian dilakukan serta mengidentifikasi variabel inti dari penelitian. Analisis ini menurut Glaser adalah variabel yang merupakan variabel yang dicari dan diuji lagi pada tiap instrument penelitian (Glaser, 1978).

Unit analisa dalam penelitian ini adalah *Multiple Embedded* unit analisa. Dimana objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini akan berfokus pada suatu unit analisis di perusahaan yang menggunakan lahan konsensi dalam usahanya, salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bagian ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai jawaban atas hasil penelitian mengenai pengakuan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO berdasarkan analisis data dan instrumen penelitian yang telah dibahas pada bahasan sebelumnya. Pada bagian ini juga akan dibahas mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai sehingga cara/metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menghitung besar kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO yang harus dibayarkan oleh perusahaan diakhir periode kontrak dapat dilakukan dengan metode yang tepat. Sehingga nantinya juga akan mampu mengestimasi nilai atas kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO yang dianggap mampu merepresentasikan nilai yang sesungguhnya

harus diakui oleh perusahaan sehingga laporan keuangan tersebut merupakan laporan yang andal dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan perusahaan.

Penelitian ini akan menganalisis cara yang tepat untuk dapat digunakan oleh perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas dalam menghitung besar kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau dikenal singkat sebagai ARO (*Asset Retirement Obligation*) yang akan diakui terkait usahanya di sektor hulu migas. Hal ini guna mengetahui apakah dari besaran kewajiban yang dicadangkan tersebut sudah cukup untuk menutup segala potensi masalah terkait usaha yang dijalankan. Komponen penilaian atas cara yang digunakan untuk menghitung besar kewajiban pembongkaran dan restorasi aset dapat dilihat melalui riwayat transaksi serupa yang dilihat melalui Kontrak Kerja Sama atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Profit Sharing Contract* (PSC), informasi yang ada dalam laporan keuangan atau laporan audit serta data yang diberikan oleh pihak ahli sebagai orang ketiga dalam kasus tertentu, maupun di dalamnya termasuk informasi tambahan yang diberikan setelah tanggal neraca. Berikut ini hasil dari analisis masing-masing komponen untuk melihat apa saja yang mendasari perusahaan dalam menentukan nilai kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO (*Asset Retirement Obligation*), antara lain:

Kontrak Kerja Sama atau *Profit Sharing Contract* (PSC)

Merupakan komponen penilaian pertama yang akan dibahas di mana penelitian ini mengambil perbandingan dari *Profit Sharing Contract* (PSC) yang dimiliki pada salah satu perusahaan di sektor hulu migas. Di mana kontrak tersebut dapat dijadikan alat pengukur penentu besaran nilai kewajiban pembongkaran dan restorasi aset pada kontrak-kontrak lainnya untuk sektor usaha sejenis dengan mempertimbangkan kesamaan jenis lokasi atau hal lainnya.

Berdasarkan peraturan yang dibuat pemerintah Indonesia terkait kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO (*Asset Retirement*

Obligation) memang masih belum diatur dengan tegas, karena pada awalnya di Indonesia hanya mengatur mengenai kewajiban kontraktor untuk melakukan pembongkaran aset (*abandonment*) terhadap lokasi dan fasilitas produksi yang tidak lagi terpakai. Di dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1974 telah diatur mengenai pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dijelaskan dalam beberapa pasal mengenai hal atas pembongkaran untuk instalasi pertambangan yang sudah tidak lagi terpakai dengan jangka waktu yang juga telah ditetapkan pemerintah dan juga adanya larangan untuk para kontraktor meninggalkan sumur yang tidak lagi terpakai sebelum melakukan tindakan penutupan yang layak (Pemerintah Indonesia, 1974).

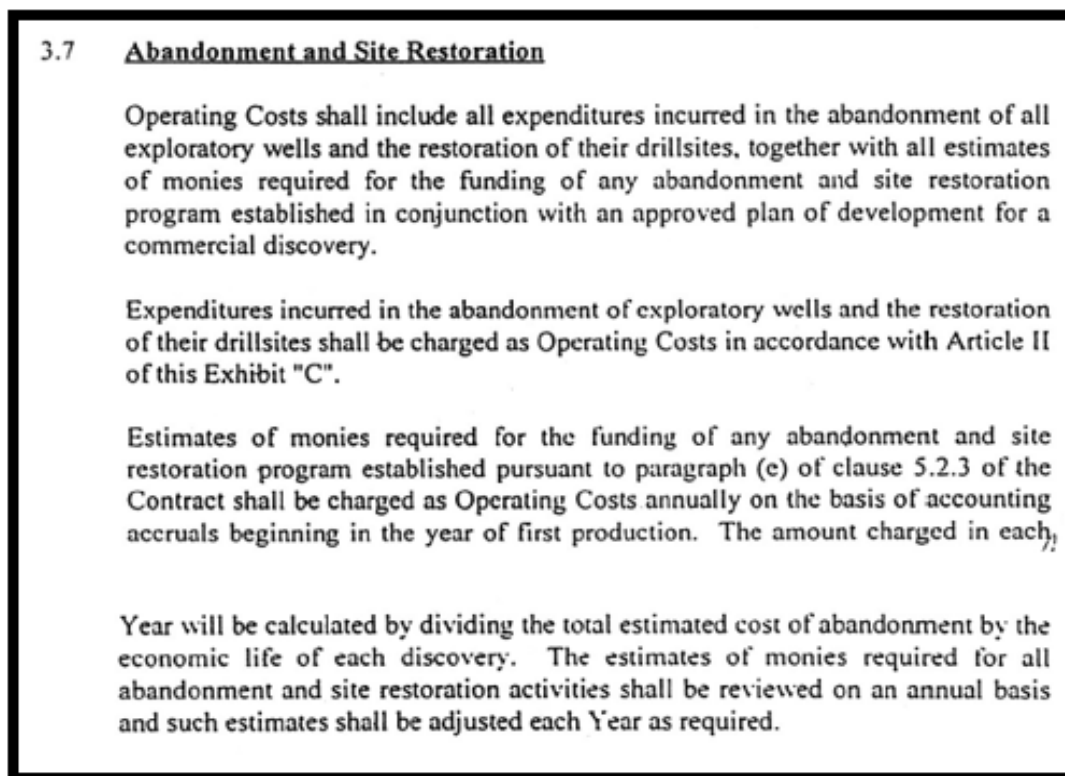
Pada tahun 2010, BP MIGAS mengeluarkan sebuah peraturan mengenai kewajiban pelaksanaan kegiatan restorasi aset yang ditetapkan pada KEP Nomor 0139/BP00000/2010/SO tentang Pedoman Tata Kerja Abandonment and Site Restoration (PTK-ASR) No.040-PTK-XI-2010 (SKK MIGAS, 2010). Pada PTK-ASR tersebut disebutkan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) harus melakukan restorasi dan abandon terhadap segala fasilitas produksi dan sarana pendukung lainnya yang telah digunakan pada saat kontrak berakhir, pada saat sebagian wilayah produksi dikembalikan, ataupun pada saat lokasi lapangan produksi ditutup dan ditinggalkan (SKK MIGAS, 2010). Sehingga pada saat ini penjelasan mengenai klausul kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO yang mana termasuk ke dalam site abandonment and restoration sudah seharusnya disebutkan di dalam Kontrak Kerja Sama atau *Profit Sharing Contract* (PSC). Di dalam kontrak akan disebutkan mengenai kewajiban kontraktor untuk dapat mengalokasikan perkiraan jumlah biaya yang nantinya diperlukan dalam merehabilitasi lingkungan serta menutup sumur yang ditinggalkan tersebut (Husein, 2008).

Pada perusahaan atau kontraktor di industri hulu migas umumnya memiliki Kontrak Kerja

Sama / PSC yang mengatur dan menyebutkan mengenai kewajiban pembongkaran dan restorasi aset, yang mana dalam data yang di dapat di dalam penelitian ini hal tersebut

disebutkan pada Kontrak Kerja Sama di Article III mengenai *Accounting Methods To Be Used To Calculate – Recovery of Operating Costs*, seperti berikut:

Abandonment and Site Restoration Clausul

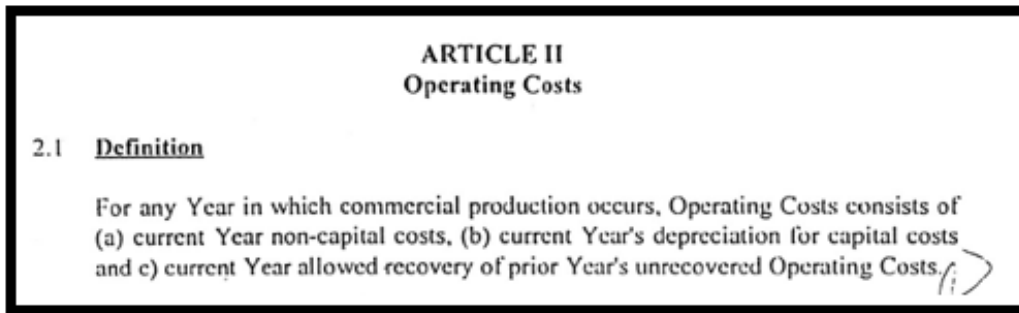


Gambar 1: Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset Pada Kontrak Kerja Sama

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa di dalam Kontrak Kerja Sama atau PSC perusahaan yang bergerak disektor hulu migas telah diatur sebuah pasal mengenai *Abandonment and Site Restoration*. Yang mana mengatur terkait kewajiban pembongkaran dan restorasi sumur terkait kewajiban pembongkaran dan restorasi aset. *Abandonment and Site Restoration* ini masuk ke dalam biaya operasi yang mana harus mencakup seluruh pengeluaran yang terjadi saat nanti ditinggalkannya sumur lokasi eksplorasi beserta dengan alat-alat di dalamnya. Biaya operasi ini juga berisi

perkiraan estimasi biaya yang akan dikeluarkan guna keperluan terkait selesainya kontrak dan meninggalkan serta menutup sumur eksplorasi tersebut. Biaya pengeluaran atas kewajiban ini yang mana merupakan pengeluaran untuk biaya pembongkaran sumur eksplorasi dapan dibebankan sebagai biaya operasi sesuai dengan kontrak PSC tersebut. Kewajiban biaya operasi terkait pembongkaran sumur eksplorasi ini juga disebutkan di dalam pasal Abandonment and Site Retstoration, hal ini juga sesuai dengan pasal lain yang disebutkan di dalam kontrak PSC pada gambar berikut ini:

Operating Costs



Gambar 2. Operating Cost

Berdasarkan gambar-gambar diatas, adanya pasal yang mengatur mengenai kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO di dalam suatu kontrak bagi hasil atau PSC, hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh narasumber yang diwawancarai terkait hal ini. Narasumber tersebut mengatakan bahwa sudah seharusnya bagi suatu kontrak PSC antara kontraktor dan pemerintah memuat sebuah pasal yang berkaitan dengan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO (R#1, 2009). Hal ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Surat Keputusan No. KEP-0139/BP00000/2010/SO tentang Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 040/PTK/XI/2010 yang menyebutkan bahwa di dalam kontrak bagi hasil ataupun kontrak kerjasama generasi ke empat wajib menyatakan kewajiban terkait rehabilitasi lingkungan di sekitar lokasi sumur serta melakukan pembongkaran seluruh instalasi dan berbagai macam peralatan yang

digunakan sebelum lokasi tersebut ditinggalkan. Meskipun pada kenyataan atas kontrak kerjasama yang digunakan sebagai data ini dibuat sebelum tahun 2010, tetapi di dalam kontrak tersebut sudah memuat pasal yang berisi mengenai kewajiban ini. Sehingga, berdasarkan data ini dan berdasarkan data yang didapat dari narasumber maka kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO (*Asset Retirement Obligation*) oleh kotraktor hulu migas ini sifatnya wajib untuk diakui di laporan keuangan perusahaan. Kewajiban ini diakui berdasarkan seluruh estimasi biaya yang dihitung untuk pembongkaran aset dan restorasi area yang dibagi berdasarkan perkiraan jumlah tahun ekonomis dari setiap sumur temuan. Atas hal ini kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO (*Asset Retirement Obligation*) dapat disimpulkan sesuai tabel berikut:

Tabel 2: Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset atau ARO (*Asset Retirement Obligation*)

Kontrak Kerja Sama (PSC)	Hasil Wawancara
Diatur di dalam PSC dalam pasal <i>Abandonment and Site Retstoration</i> , di mana nantinya mengenai liabilitas ini akan masuk ke dalam komponen biaya operasi yang diharuskan mencakup seluruh pengeluaran yang terjadi saat nanti ditinggalkannya sumur lokasi eksplorasi beserta dengan alat-alat di dalamnya.	Walaupun nilai dari ARO masih bersifat estimasi atau provisi, tetapi liabilitas atas ARO ini wajib untuk di akui oleh perusahaan di laporan keuangannya. Jika sudah ditentukan di dalam PSC maka liabilitas yang sifatnya estimasi ini merupakan <i>highly probable</i> untuk dilakukan sehingga akan masuk ke dalam <i>balance sheet perusahaan</i> . Sumur-sumur yang berada dalam suatu wilayah dalam satu PSC yang sama, akan diakui secara gabungan berdasarkan kontrak tersebut.

Di dalam PSAK 57 mengenai “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”

kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO suatu kewajiban hukum yang timbul

*RENA MAYA CAHYANTI & ARUNA WIRJOLUKITO/ Pengakuan Akuntansi Atas Kewajiban
Pembongkaran dan Restorasi Aset Pada Sektor Hulu Migas*

dari adanya kontrak bagi hasil atau kontrak PSC (IAI, 2018). Sedangkan berdasarkan peraturan per Undang-undangan Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai ARO adalah PTK-ASR No.040-PTK-XI-2010. Salah satu anak perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk yang bergerak di industri hulu migas juga berkewajiban untuk melakukan pengakuan atas kewajiban ini sebagaimana diatur oleh PSAK 57 dan juga PTK-ASR No.040-PTK-XI-2010.

Sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO merupakan kewajiban yang timbul di masa yang akan datang sehingga dalam pengakuannya haruslah dihitung berdasarkan nilai *future value* berdasarkan estimasi biaya yang akan

dikeluarkan yang selanjutnya akan di ubah menjadi present value untuk dapat diketahui nilai kini-nya. Selanjutnya aset haruslah didebitkan terlebih dahulu oleh perusahaan dan perusahaan dapat memasukkan seluruh komponen biaya yang ada pada saat pembongkaran aset ke dalam nilai aset tersebut.

Di dalam laporan keuangan anak perusahaan ini, aset atas ARO masuk ke dalam aset minyak dan gas bumi di dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Hal dikarenakan karena kewajiban yang timbul sebagai ARO memang tidak terlepas dari aset minyak dan gas bumi yang dimiliki perusahaan. Sehingga jika dijabarkan di dalam laporan keuangan perusahaan aset minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)	2017	Catatan/ Notes	2016	STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2017 (Expressed in United States Dollars, Unless Otherwise Stated)
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	30.168.126	2,4	4.098.583	Cash and cash equivalents
Piutang usaha		2,5a,5b,27		Trade receivables
Pihak berelasi	15.371.107	8c	12.773.927	Related parties
Pihak ketiga	8.250.409		8.715.424	Third parties
Piutang lain-lain	11.130.758	2,3,6,27	28.745.322	Other receivables
Persediaan	2.486.182	2,3,7	2.486.058	Inventories
Beban dibayar di muka	124.625	2,10	14.061	Prepaid expenses
Aset lancar lain-lain	11.251	9,10,25	11.251	Other current assets
Jumlah Aset Lancar	67.542.458		56.844.626	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang dari pihak berelasi	3.595.192	2,8c	835	Trade receivables from related parties
Piutang lain-lain	901.105	2,3,6,27	2.242.206	Other receivables
Aset eksplorasi dan evaluasi	5.569.388	2,3,9a	5.569.388	Exploration and evaluation assets
Aset minyak dan gas bumi	231.742.304	2,3,9b	247.262.144	Oil and gas properties
Aset lain-lain	218.160	2,10	455.592	Other assets
Aset derivatif	1.086.970	11	933.054	Derivative assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	243.113.119		256.463.219	Total Non-current Assets
JUMLAH ASET	310.655.577		313.307.845	TOTAL ASSETS

Gambar 3. Aset Minyak dan Gas Bumi pada Balance Sheet Perusahaan

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)	STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Continued) As of December 31, 2017 (Expressed in United States Dollars, Unless Otherwise Stated)			
	2017	Catatan/ Notes	2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	1.608.240	2,12,26,27	2.426.667	Trade payables
Utang lain-lain	27.195.722	2,13,26,27	13.791.040	Other payables
Utang pajak	7.201.700	2,3,16a	18.046.723	Taxes payable
Biaya akrual	3.553.931	2,14,26	4.245.509	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	2,3,20	105.396	Employee benefits liabilities - current portion
Pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	51.100.000	2,15,26,27	42.600.000	Current maturities of long-term bank loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	90.659.593		81.215.335	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka panjang	95.319.145	2,15,26,27	145.067.233	Long-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi	885.390	2,8d,26,27	2.628.753	Trade payables to third parties
Liabilitas pajak tangguhan	24.318.786	2,16c	24.702.466	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja	949.125	2,3,20	-	Employee benefits liabilities
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area	4.296.864	2,3,25	4.350.541	Asset abandonment and site restoration
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	125.769.310		176.748.993	Total Non-current Liabilities
Jumlah Liabilitas	216.428.903		257.964.328	Total Liabilities

Gambar 4. Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area

Di dalam laporan keuangan ini, dijelaskan juga bahwa perusahaan mengakui kewajiban pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area atas fasilitas produksi minyak dan gas bumi, sumur, jaringan pipa, dan aset-aset yang terkait sesuai dengan persyaratan dalam kontrak bagi hasil. Tahap estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area diakui sebagai komponen pada biaya perolehan, yang kemudian disusutkan atau didepresiasi dengan menggunakan metode satuan unit produksi yang sejalan dengan tariff penyusutan yang dipilih oleh perusahaan. Sesuai dengan kontrak yang ada maka sisa masa depresiasi aset untuk biaya pembongkaran berdasarkan kontrak adalah lima tahun pada tahun 2017, mengingat masa kontrak adalah sampai 2022.

Berdasarkan pendapat dari responden 3, yang mana berperan sebagai seorang ahli ekonom perusahaan menyebutkan bahwa aktivitas pembongkaran dan pemindahan aset, dan restorasi area fasilitas produksi minyak dan gas bumi, sumur, dan jaringan pipa dan aset terkait

terjadi beberapa tahun yang akan datang sesuai dengan batas akhir masa kontrak dan jika kontrak tidak lagi diperpanjang. Perkiraan dari besarnya kewajiban ini telah dinilai secara andal oleh pihak manajemen mengenai saat aktivitas tersebut akan dilakukan, sejauh mana aktivitas tersebut harus dilakukan, dan juga teknologi yang akan digunakan di masa depan (R#3, 2019).

Sedangkan jika dilihat dari pendapat pakar akuntansi perusahaan atas kewajiban ini penyajiannya telah disesuaikan yang mana akan mencerminkan dalam nilai kini atas provisi liabilitas pemboran dan pemindahan aset, dan restorasi area pada tanggal laporan posisi keuangan, dimana perusahaan juga akan melakukan penyesuaian dengan jumlah yang sama atas nilai buku aset yang bersangkutan (R#2, 2019). Kemudian lawan pencatatan atau pembalikan dari efek diskonto dalam penghitungan provisi ini diakui sebagai beban pendanaan.

Kewajiban atas pembongkaran dan restorasi aset untuk tahun 2016 dan 2017 ini ditentukan

*RENA MAYA CAHYANTI & ARUNA WIRJOLUKITO/ Pengakuan Akuntansi Atas Kewajiban
Pembongkaran dan Restorasi Aset Pada Sektor Hulu Migas*

sesuai tingkat bunga yang disepakati antara pihak regulator (pemerintah) dengan pihak kontraktor (perusahaan) yaitu sebesar 6%. Perusahaan dalam menyajikan liabilitas

pembongkaran aset ini dilakukan secara neto dengan rekening yang telah dicadangkan melalui suatu Bank yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Mutasi akun ini disajikan sebagai berikut:	<i>The account movements are presented below:</i>		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
Saldo awal	10.247.536	9.754.416	<i>Beginning balance</i>
Akresi selama tahun berjalan	522.707	493.120	<i>Accretion during the year</i>
Saldo akhir	10.770.243	10.247.536	<i>Ending balance</i>
Rekening yang dicadangkan	(6.473.379)	(5.896.995)	<i>Escrow accounts</i>
Saldo akhir liabilitas	4.296.864	4.350.541	<i>Liabilities ending balance</i>

Gambar 5. Saldo Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area Tahun 2017

Berdasarkan data saldo liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area yang disajikan pada *audit report* perusahaan diperoleh dari angka laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan berbagai audit

adjustment di dalamnya. Jumlah saldo awal di tahun 2017 telah dicocokkan ulang dengan saldo akhir yang ada pada laporan keuangan di tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Mutasi akun ini disajikan sebagai berikut:	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Saldo awal	9.754.416	9.289.209
Akresi selama tahun berjalan	493.120	465.207
Saldo akhir	10.247.536	9.754.416
Rekening yang dicadangkan	(5.896.995)	(5.291.171)
Saldo akhir liabilitas	4.350.541	4.463.245

Gambar 6. Saldo Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area Tahun 2016

Besar beban akresi selama tahun berjalan dihitung dengan cara mengalikan saldo awal dari kewajiban pembongkaran dan restorasi aset dengan tingkat bunga diskonto yang digunakan perusahaan dalam menghitung present value nilai aset saat ini. Beban akresi ini merupakan beban tambahan yang berasal dari perbedaan tingkat diskonto disetiap tahun. Dari saldo awal dan beban akresi inilah nantinya kemudian harus dihitung dengan persentase jumlah participating interest perusahaan sebelum melakukan langkah selanjutnya yaitu

pencatatan jurnal akuntansi dalam pembukuan perusahaan. Dalam menentukan nilai kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO (*Asset Retirement Obligation*) perusahaan melakukan penggabungan beberapa perhitungan dari beberapa divisi. Dalam kaitannya dengan kelayakan *audit report* perusahaan nilai-nilai yang tercatat di dalamnya sepanjang tahun 2017 dapat dicocokkan dengan data terdahulu yaitu tahun 2016, maupun dengan data laporan keuangan akuntansi yang merupakan sumber utamanya. Sehingga berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan kepada responden 1 dan responden 2, maka dapat melalui audit report perusahaan ini pihak manajemen perusahaan telah meyakinkan bahwa akumulasi penyisihan pada laporan tanggal laporan posisi keuangan perusahaan telah cukup untuk menutupi semua liabilitas

yang timbul dari kegiatan pembongkaran aset dan restorasi area.

Dengan demikian berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka penilaian pencadangan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset yang dilakukan oleh perusahaan dapat disimpulkan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3. Pengakuan Atas Kewajiban Pembongkaran dan Restorasi Aset atau ARO (*Asset Retirement Obligation*) Pada Perusahaan di Sektor Hulu Migas

Isu	Implementasi	Praktik di Lapangan	Temuan
Pengakuan atas perhitungan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset (<i>Asset Retirement Obligation</i> / ARO)	Perusahaan sebagai salah satu kontraktor migas mengakui ARO dengan menggunakan cara yang sudah ditetapkan yaitu berdasarkan rumus <i>future value</i> (FV) yang kemudian di <i>present value</i> (PV) kembali dengan menggunakan tingkat inflasi dan tingkat bunga diskonto.	Berdasarkan praktik yang dilakukan di perusahaan, digunakan rumus menggunakan <i>future value</i> (FV) dikarenakan perusahaan perlu untuk mengetahui nilai yang harus dicadangkan di masa depan, baru kemudian dihitung lagi untuk mendapatkan nilai masa kininya	Tidak ada temuan yang mencurigakan mengingat semua data telah disajikan secara baik dalam laporan keuangan maupun <i>audit report</i> perusahaan disetiap tahunnya.

Berdasarkan teori sinyal yang dipilih dalam penelitian ini, dimana teori sinyal merupakan sinyal untuk para investor untuk perkiraan pendapatan manajemen (Brigham & Houston, 2001), maka jika dikaitkan untuk penelitian ini maka dengan adanya kaitan perhitungan pengakuan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO (*Asset Retirement Obligation*) di perusahaan hulu migas dapat menjadi sebuah sinyal untuk para investor maupun pihak manajemen atas apa yang ingin dicapai kedepannya. Hal ini karena bisa saja besar kewajiban ini merupakan salah satu kategori penentu yang dilihat dalam memutuskan strategi bisnis di perusahaan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak narasumber, bahwa dikarenakan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO (*Asset Retirement Obligation*) ini bernilai sangat besar, apalagi untuk usaha yang berada di lokasi kegiatan di

tengah laut atau *offshore* sehingga kewajiban ini pasti akan menjadi titik ukur pihak manajerial perusahaan dalam menentukan keputusan (R#1, 2009). Sehingga adanya perhitungan yang sesuai dan benar serta dapat diandalkan sangat akan sangat mempengaruhi sebagai informasi pihak manajerial dalam membuat keputusan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan dan diungkapkan oleh narasumber kedua, bahwa kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO (*Asset Retirement Obligation*) bukan merupakan satu-satunya faktor di dalam mengambil keputusan strategis perusahaan, tetapi menjadi salah satu faktor karena dengan adanya informasi nilai pencadangan kewajiban yang diharuskan maka akan menjadi dasar bagi pihak manajerial perusahaan mengenai strategi bisnis perusahaan kedepannya (R#2, 2009). Oleh karena itu berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka teori sinyal dapat

dianggap tepat sebagai teori awal yang ingin dikembangkan di dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dimana tujuan penelitian ini adalah untuk dapat memberikan gambaran mengenai cara/metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menghitung besar ARO yang harus dibayarkan oleh perusahaan diakhir periode kontrak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara atau metode yang digunakan perusahaan dalam menentukan nilai kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO yang sesuai untuk mengatasi potensi masalah yang timbul di akhir masa kontrak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran (*mixed-method*) dalam menganalisa hasil temuan, sehingga akan menghasilkan hasil temuan yang lebih mendalam dan kompleks yang nantinya berguna untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau ARO (*Asset Retirement Obligation*) pada perusahaan di sektor hulu migas merupakan kewajiban yang sangat material di dalam perusahaan. Kewajiban ini dikarenakan besarnya jumlah yang harus dicadangkan atas aset minyak dan gas bumi yang dimiliki perusahaan. Hal dikarenakan karena kewajiban yang timbul sebagai ARO (*Asset Retirement Obligation*) memang tidak terlepas dari aset minyak dan gas bumi yang dimiliki perusahaan. Sehingga berdasarkan dengan teori sinyal, besar pengakuan kewajiban ini harus dapat diandalkan guna membantu pihak manajerial dalam menentukan strategi bisnis perusahaan. Walaupun kewajiban ini bukanlah merupakan satu-satunya tolak ukur tetapi karena kewajiban ini nilainya sangat besar maka kewajiban ini juga merupakan salah aspek yang dipilih oleh pihak manajerial perusahaan dalam mengambil keputusan.

Kewajiban ini harus dihitung berdasarkan rumus *future value* (FV) yang kemudian di *present value* (PV) kembali dengan menggunakan tingkat inflasi dan tingkat bunga diskonto. Kewajiban ini sifatnya adalah kewajiban kontinjensi yang mana besarnya masih merupakan provisi atau pencadangan yang dilakukan perusahaan. Sehingga walaupun kewajiban ini jika diterapkan secara akuntansi masuk ke dalam PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi, tetapi dikarenakan perusahaan di sektor hulu migas menggunakan lahan konsensi pemerintah, maka kewajiban ini sifatnya adalah *highly probable* di dalam perusahaan. Terlebih kewajiban pembongkaran dan restorasi aset ini telah diatur di dalam Kontrak Kerja Sama perusahaan dengan pemerintah yang mana harus dilakukan oleh perusahaan selama masa kontrak berlangsung.

Keterbatasan di dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data terkait hal ini karena saat penelitian ini dilakukan perusahaan belum dalam akhir masa kontrak sehingga tidak dapat diketahui secara langsung apakah pencadangan yang telah dilakukan selama masa kontrak memang benar secara nyata diakhir masa kontrak dapat mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang timbul dari kewajiban pembongkaran dan restorasi aset. Kemudian dikarenakan adanya keterbatasan waktu pula maka penelitian ini mengambil lokasi penelitian yang memiliki kewajiban yang besar terkait dengan adanya faktor geografis aset perusahaan yang dimiliki saja. Kemudian penelitian ini juga terbatas atas pendapat yang didasarkan pada sisi pekerja perusahaan bukan pada sisi manajerial perusahaan, dikarenakan dengan adanya alasan bahwa penelitian ini dilakukan bukan pada persis di akhir masa kontrak, dan penelitian ini hanya ingin mengetahui apakah perhitungan atas pengakuan yang dibuat sudah dinilai secara andal.

Usulan yang dapat diberikan di dalam penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah kemungkinan adanya penelitian yang

akan membahas mengenai kewajiban pembongkaran dan restorasi aset dilihat dari sisi manajerial atas perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa atas kewajiban ini nilai yang dicadangkan adalah cukup besar sehingga pasti seharusnya akan menjadi dasar tolak ukur penilaian di tahap manajerial atas terkait dengan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, E., & Hiner, R. (2001). Accounting for Asset Retirement Obligation. Retrieved from <https://www.journalofaccountancy.com/issues/2001/dec/accountingforassetretirementobligations.html>
- Arifin, Z. (2005). *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- FASB. (2001). Financial Accounting Standard Board.
- Glaser, B. G. (1978). *Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory*. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- Husein, M. (2008). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- IAI. (2018). *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Revisi 2009*. Ikatan Standar Akuntansi Keuangan.
- Indonesia, K. K. R. (2018). No Title. Retrieved December 31, 2018, from <https://www.kemenkeu.go.id/media/6634/nota-keuangan-rapbn-2016.pdf>
- Kretarto, A. (2001). Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Perusahaan Berbasis Kepatuhan. In *Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Perusahaan Berbasis Kepatuhan* (p. 53). Grafiti Pers.
- Kusumawati, U. D. (2015). No Title. Retrieved February 2, 2019, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150529134709-20-56529/sudah-ditetapkan-dpr-bencana-alam-lapindo-tak-bisa-dipidana>
- Moleong, L. (2006). *Methodology Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Purba, M. P. (2009). *International Financial Reporting Standards Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shelley, M., & Krippendorff, K. (2006). *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*. *Journal of the American Statistical Association* (Second Edi, Vol. 79). California: Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.2307/2288384>